LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019

BADAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN ROTE NDAO
2020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Keuangan dan Aset yang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebagai penyelenggaraan keuangan daerah, mempunyai peran strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka disusun Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 yang menyajikan berbagi keberhasilan/capaian strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao serta sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang perlu diperbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercantum dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisi kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, pada tahun 2019 Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao ditunjang oleh 2 (dua) sasaran, 3 (tiga) indikator, 6 (enam) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran, secara umum telah mencapai nilai kisaran 100 %, sedangka realisasi keuangan dari target Rp.202.754.629.994,26 terealisasi sebesar Rp.188.309.334.375,00 atau sebesar 92,90 %.

Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA ORDINAL
1	Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Sangat Berhasil
	RATA-RATA	100	**Sangat Berhasil**

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao telah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih sayangNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset tahun 2019 dapat tersusun.

Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan good governance di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, yang mengemban amanah menjalankan sebagian urusan di bidang manajemen keuangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini selain berfungsi sebagai alat kendali juga menjadi instrument penilai kualitas kinerja serta media pertanggungjawaban kepada publik.

Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao selama 1 (satu) tahun yang akan menjadi sumber informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama dengan baik dalam penyusunan Laporan Kinejra Instansi Pemerintah (LKIP) ini. Semoga dapat bermanfaat dan diucapkan Terima Kasih.

Baa, 4 Februari 2020
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao,

Daniel W. Nalle, S.Pt
Nip. 19710518 200603 1 004

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1

C. GAMBARAN UMUM 2

D. DASAR HUKUM 7

E. SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 9

A. RENCANA STRATEGIS 9

a. VISI 11

b. MISI 12

c. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN 12

1. TUJUAN 12

2. SASARAN 13

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 17

B. REALISASI ANGGARAN 23

BAB IV PENUTUP..... 25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur.

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sebagai unsur penyelenggara negara di daerah wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang dtetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Sebagai instrumen pertanggungjawaban dan pelaporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao;
2. Sebagai model acuan pembelajaran Rencana Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao selanjutnya.

Sedang tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Untuk melihat tingkat progresivitas dan kegagalan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao;
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan krusial yang resistant.
3. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian sehingga terwujud Peningkatan dalam Pengelolaan Keuangan dan

Aset yang efektif, efisien, berdaya guna / berhasil guna, berdaya saing dan berkelanjutan.

C. Gambaran Umum

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur staf perangkat dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. Bagan Struktur Organisasi

Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu Sekretariat dan 4(empat) Bidang yakni :

1. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Perbendaharaan;
   b. Sub Bidang Kas Daerah; dan
   c. Sub Bidang Pengelolaan Gaji.
3. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi;
   b. Sub Bidang Akuntansi Bendahara Umum Daerah; dan
   c. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Bidang Anggaran, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
   b. Sub Bidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran; dan
   c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

5. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengadaan dan Pengamanan Aset;
   b. Sub Bidang Penilaian, Penghapusan dan Pemberdayaan Aset; dan
   c. Sub Bidang Penatausahaan Aset.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao berjumlah 32 orang PNS dan 8 orang tenaga honorer. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, perumus kebijakan, dalam pelaksana pengendalian pembangunan.

Pada tahun 2019 jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao berjumlah 32 orang, terdiri dari 13 orang Pejabat Struktural dan 19 Pelaksana. Rincian Pegawai Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Jenis Kelamin

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

Golongan	Pangkat	Jenis kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
I/a	Juru Muda	0	0	0
I/b	Juru Muda Tk. I	0	0	0
I/c	Juru	0	0	0
I/d	Juru Tk. I	0	0	0
Jumlah Golongan I		**0**	**0**	**0**

Golongan	Pangkat	Jenis kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
II/a	Pengatur Muda	0	0	0
II/b	Pengatur Muda Tk. I	2	1	3
II/c	Pengatur	1	0	1
II/d	Pengatur Tk. I	6	1	7
Jumlah Golongan II		**9**	**2**	**11**
III/a	Penata Muda	5	2	7
III/b	Penata Muda Tk. I	4	0	4
III/c	Penata	1	5	6
III/d	Penata Tk. I	1	2	3
Jumlah Golongan III		**11**	**9**	**20**
IV/a	Pembina	1	0	1
IV/b	Pembina Tk. I	0	0	0
IV/c	Pembina Utama Muda	0	0	0
IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0
Jumlah Golongan IV		**1**	**0**	**1**
Total		**21**	**11**	**32**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 32 orang, 21 orang berjenis kelamin laki-laki dan 11 orang perempuan.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SLTA	10	2	12
4	D-1	-	-	-
5	D-2	-	-	-
6	D-3	1	1	2
7	S-1	11	8	18
8	S-2	-	-	-
9	S-3	-	-	-
TOTAL		**21**	**11**	**32**

Dari jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S1 berjumlah 18 orang, D3 berjumlah 2 orang dan SMA berjumlah 12 orang.

3. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yakni APBD.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok :***"Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan dan Aset Daerah"***.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Keuangan dan Aset
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan pada :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

LKIP Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
  - a. Visi
  - b. Misi
  - c. Penetapan Tujuan dan Sasaran
    1. Tujuan
    2. Sasaran
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Substansi Perencanaan strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan suatu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya untuk diimplementasikan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Renstra sangat bermanfaat dan diperlukan untuk :

1. Merencanakan aktifitas perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

   Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era reformasi mengakibatkan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin prima, semakin terbatasnya sumber daya serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan.

   Hal ini yang mendorong Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan perubahan mendasar, untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan.

   Perencanaan Strategis akan menuntun diagnosa Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan Perencanaan Strategis ini diharapkan menjadi bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapasitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Menentukan orientasi masa depan.

   Perencanaan Strategis memungkinkan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Perencanaan Strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif guna implementasi dan implikasi yang terjadi dan dapat diarahkan untuk merencanakan strategi organisasi pada masa mendatang.

4. Adaptif.

   Fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam Perencanaan Strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam Perencanaan Strategik.

5. Pelayanan Prima.

   Pelayanan kepada masyarakat dalam era globalisasi merupakan hal yang utama untuk diperhatikan Pemerintah. Disamping itu dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu pemahaman terhadap siapa pelanggan, kebutuhannya serta solusi pemenuhannya sangat diperlukan.Pola pelayanan yang perlu diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau masyarakat sebagai penerima jasa layanan pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk dapat tetap diterima

oleh masyarakat. Oleh karena itu pemahaman terhadap siapa pelanggan, kebutuhannya serta solusi pemenuhannya sangat diperlukan. Pola pelayanan yang perlu diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau masyarakat sebagai penerima jasa layanan.

6. Meningkatkan komunikasi.

   Implementasi Perencanaan Strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi. Mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai dan mendorong pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan. Implementasi Perencanaan Strategis oleh Pemerintah dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horisontal Badan.

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2014-2019

a. Visi :

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat 3 (tiga) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang pengesahannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 yakni :

"Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT yang Bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan".Berdasarkan rumusan di atas maka visi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 adalah :

"Terwujudnya Sektor Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas, Transparan, Partisipatif dan Akuntabel".

b. Misi :

Berdasarkan visi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka misi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Profenasionalisme SDM Aparat Badan Keuangan dan Aset;
2. Memantapkan Sistim dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan.

c. Penetapan Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Pelayanan SKPD

Tujuan Organisasi adalah untuk memperjelas fokus pelaksanaan misi kemudian menetapkan kerangka prioritas untuk memberikan arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sebagai unit teknis memfokuskan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yakni :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Aparat Badan Keuangan dan Aset;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Aparat Badan Keuangan dan Aset;
3. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Meningkatkan fungsi dan peran di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao;
6. Ketepatan, kecepatan, kemudahan, keadilan dan tuntas dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Sasaran

Sasaran merupakan gambaran dari tujuan yang akan dicapai oleh suatu lembaga dengan sasaran prioritas, tindakan SDA, SDM dan Dana dalam kegiatan operasional.

Sasaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Adanya kebijakan dan peraturan-peraturan yang mendukung kegiatan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
2. Tersedianya juklak dan juknis yang menjadi pedoman, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
3. Terlaksananya sosialisasi tentang jenis-jenis pendapatan serta tata cara Pengelolaan keuangan dan Aset;
4. Terciptanya serta tersedianya informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik;
5. Tersedianya sumberdaya manusia (aparat) yang berkualitas dan profesional;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan;
7. Meningkatnya fasilitas pendukung data Pengelolaan Keuangan dan Aset;
8. Terwujudnya persepsi yang sama tentang pengelolaan Keuangan dan Aset.

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tersebut di atas, maka dirumuskan program dan kegiatan strategis sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
13. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Wilayah Provinsi NTT

B. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
   1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

C. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
   1. Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Aparatur

D. **Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
   1. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
   2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Ahkir Tahun
   3. Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Dana Bergulir
   4. Kegiatan Monitoring, dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

E. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
   1. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja
   2. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
   3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
   4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
   5. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
   6. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahaan APBD
   7. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

8. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
9. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset Daerah / Barang Daerah
10. Kegiatan Asistensi RKA – SKPD
11. Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD di Propinsi
12. Kegiatan Penataan dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah
13. Kegiatan Penelitian dan Evaluasi DPA – SKPD
14. Kegiatan Iventarisasi Aset Daerah
15. Kegiatan Penghapusan Aset / Barang Daerah
16. Kegiatan Fasilitasi / Pembentukan SIMDA
17. Kegiatan Penatausahaan Sistim Belanja daerah/Penyelenggaraan Perbendaharaan
18. Kegiatan Pengelolaan Sistim Penggajian PNS
19. Kegiatan Rekonsiliasi Data Belanja dan Pelaporan Dana Transfer ke Daerah
20. Kegiatan Penataan dan Pembiayaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

F. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Kegiatan Penyusunan KUA / PPAS Induk / Murni
2. Kegiatan Penyusunan KUA / PPAS Perubahan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahun 2019, Penetapan Kinerja Tahun 2019, Pengukuran Kinerja Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dokumen LKIP ini. Adapun Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 diringkas sebagai berikut :

SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET KAB. ROTE NDAO TAHUN 2019

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	KINERJA	
Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	Wajar Dengan Pengecualian
	Persentase Aset Daerah yang di inventarisasi	30%
Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penetapan Perda APBD dan Perbup Tepat Waktu	3 Perda dan 3 Perbup

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas- tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan Renstra. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran stategis organisasi. Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sararan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dan diperanjikan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja.

1. AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao adalah Renstra dan Penetapan Kinerja Tahun 2019, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

2. PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja .Indikator kinerja sasaran dibuat untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya. Dengan demikian keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dan terukur dengan jelas.

2. **Metode Penyimpulan Capaian Sasaran**

Penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran sebagai berikut :

$X \geq 85\ \%$	Sangat Berhasil
$70\ \% \leq X < 85\ \%$	Berhasil
$55\ \% < X < 70\ \%$	Cukup Berhasil
$X \leq 55\ \%$	Belum Berhasil

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah

Sasaran ini diarahkan dalam rangka Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah. Program yang mendukung sasaran ini adalah program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan, dan beberapa kegiatan dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.801.740.000,00 dengan realiasinya sebesar Rp.757.675.140,00 dengan total pagu anggaran seluruhnya sebesar Rp.1.181.740,00 terelesasi sebesar Rp.1.079.708.440,00

Tabel. 3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian	Renstra 2020
			Target	Realisasi		
1. Opini BPK Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	Opini	WDP	WDP	WDP	100%	WTP
2. Prosentase Aset Daerah yang di Iventarisasi	%	30%	30%	69%	230%	65%

Penjelasan atas capaian indikator diatas adalah sebagai berikut :

1.) Opini BPK Terhadap Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 di targetkan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) realisasinya sesuai dengan target yaitu Opini BPK adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dimana Pengecualian yang masih diangkat oleh BPK yaitu tentang terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas pencatatan dan penyajian Aset Tetap sehingga BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuain terhadap data Aset Tetap dimaksud.

2.) Prosentase Aset Daerah :

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini adalah 69 % pada tahun 2019 yang akan dilakukan sebanyak 13 OPD di Inventarisasikan dan terealisasi 9 OPD yang dilakukan Penghapusan yaitu :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Dinas Peternakan
3. Kantor Kesbangpol
4. Kantor BPBD
5. Bagian Pemerintahan Umum dan Kesra
6. Kecamatan Rote Timur
7. Kecamatan Pantai Baru
8. Kecamatan Rote Selatan
9. Kecamatan Rote Barat Daya

SASARAN 2	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran ini diarahkan dalam rangka Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada kepentingan Publik yaitu ketepatan didalam Penetapan APBD Induk, Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta Penetapan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan APBD Induk, Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD. Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan beberapa kegiatan dalam program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu sebesar Rp.2.237.710.000,00, realisasi sebesar Rp.2.021.127.126,00 dengan total pagu anggaran seluruhnya sebesar Rp.2.574.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.348.399.972,00

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terkelolanya Aset Daerah yang berorientasi pada kepentingan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2017	2018		Capaian	Renstra 2019
			Target	Realisasi		
Jumlah Penetapan Perda APBD dan	Jumlah	3 Perda	3 Perda	3 Perda	100%	3 Perda
Perbup Tepat Waktu		3 Perbup	3 Perbup	3 Perbup	100%	3 Perbup

Jumlah Penetapatan Perda APBD dan Perbup Tepat Waktu :

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 di targetkan 3 Perda dan 3 Perbup yang ditetapkan dengan realisasinya sebanyak 3 Perda dan 3 Perbup dengan capaian indikator kinerja mencapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 yang bersumber APBD dengan rinciannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	
		Rp	%
Belanja Tidak Langsung	**189.691.677.994,26**	**176.203.826.157,00**	**92,89**
Belanja Langsung	**7.062.952.000,00**	**6.605.508.218,00**	**93,52**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.143.984.000,00	3.021.685.077,00	96,11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38.488.000,00	38.366.871,00	99,69
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	124.740.000,00	117.347.858,00	94,07
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	380.000.000,00	322.033.300,00	84,75
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.039.450.000,00	2.778.802.266,00	91,42
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	336.290.000,00	327.272.846,00	97,32
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**6.000.000.000,00**	**5.500.000.000,00**	**91,67**
TOTAL/ JUMLAH	**202.754.629.994,26**	**188.309.334.375,00**	**92,88**

Sesuai data Realisasi yang ada maka capaian sasaran Badan keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao telah berhasil dalam menggelola anggaran untuk mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 ini merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao. Media ini sangat penting sebagai umpan balik pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait. Sebagaimana kita maklumi bahwa berbagai pengalaman dan hikmah dari kelemahan-kelemahan sistem pendekatan pembangunan yang telah dilakukan selama ini maka perspektif pembangunan di era Otonomi Daerah yang luas dewasa ini cenderung berkembang kearah yang menuntut efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas, kebijaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu betapapun sederhananya kriteria yang digunakan, identifikasi terhadap kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan harus disikapi secara transparan dan disajikan secara tegas dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kebijakan yang akan diterapkan dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan pembangunan sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pejabat dan Aparatur Pemerintah yang didukung dengan etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban, serta mampu melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan dibarengi oleh suatu perwujudan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian mengingat akuntabilitas kinerja ini perlu dievaluasi secara terus-menurus sebagai kerangka pertanggungjawaban maka perlu disusun dalam suatu bentuk laporan yang dibuat secara periodik.

Akhir kata, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang membantu dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao serta atas kerjasamanya dalam penyelesaian LKIP Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

Baa, 4 Februari 2020
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao

Daniel W. Nalle, S.Pt
Pembina
Nip. 19710518 200604 1 003